

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang menganut sistem demokrasi, Menurut Alamudi (1991) demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku, sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu, mungkin saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan di depan hukum yang harus dimiliki setiap masyarakat untuk secara pantas disebut demokrasi. Di Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak tahun 1945, yang saat itu merupakan demokrasi parlementer, demokrasi di Indonesia sendiri terus bersifat dinamis karena sejak tahun 1945 demokrasi di Indonesia sudah mengalami 4 kali perubahan yaitu sistem demokrasi parlementer, dipimpin pada masa orde lama, Pancasila pada masa orde baru dan pada periode reformasi.

Demokrasi suatu sistem yang telah dijadikan alternatif dalam tatanan aktifitas bermasyarakat dan bernegara. Dan demokrasi merupakan asas yang fundamental dalam pemerintahan. Jadi demokratisasi berarti berkedaulatan yang berada di tangan rakyat dengan kata lain, kedaulatan rakyat mengandung pengertian bahwa setiap sistem kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara dibawah kendali rakyat. Sistem demokrasi memiliki ciri oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat artinya semua kebijakan yang ada di Indonesia harus berpihak pada rakyat, selain itu seluruh struktur pemerintahan khususnya presiden harus ditentukan oleh rakyat, namun pemilihan secara langsung oleh rakyat Indonesia baru dimulai pada tahun 2005 sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh DPR dan MPR, namun sejak tahun 2005 pemilihan dilakukan secara langsung, sejak saat itu baik presiden, gubernur bupati dan wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi. Pesta demokrasi yang merupakan perwujudan tatanan kehidupan negara dan masyarakat yang berkedaulatan rakyat, pemerintahan dari dan untuk rakyat. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung digelar di tanah air pertama kali pada tahun 2005, Pilkada langsung ini memberikan kesempatan yang luas bagi pemilih untuk menentukan pilihannya sesuai keinginan dan hati nurani masing-masing yang ada di daerah. Penyelenggaraan Pilkada diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya dijelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; untuk mewujudkan kepemimpinan daerah yang demokratis yang memperhatikan prinsip persamaan dan keadilan, penyelenggaraan pemilihan kepala pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara yang memenuhi persyaratan. (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008).

Menurut Afrina Sari (2012) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sebuah pesta demokrasi tingkat wilayah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Pilkada di Indonesia dilaksanakan berdasarkan sistem politik Indonesia, dimana setiap pasangan calon harus diusung oleh partai politik yang mendukung pasangan tersebut.

Setiap mendekati saat pemilihan umum biasanya pemerintah memberikan waktu untuk melakukan kampanye atau mempromosikan diri kepada masyarakat untuk memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program yang akan dilaksanakan. Setiap para calon tentu memiliki tim sukses untuk mensukseskan dirinya dalam pemilu, tim sukses biasanya diisi oleh orang-orang yang berpengalaman dalam dunia politik, namun hal itu yang berbeda terjadi di madura dimana para calon baik legeslatif bahkan kepala desa menjadikan tokoh masyarakat atau yang dikenal dengan bajing untuk menjadi tim sukses dalam pemilu.

Bajing merupakan wajah yang sesungguhnya dari masyarakat Madura, sebelum Madura ini mengalami prosese modernisasi oleh berbagai kultur dominan yang merembahnya. *Bajing* merupakan tokoh informal yang berperan penting di dalam masyarakat baik itu di dalam rangka pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah maupun segala aktivitas kegiatan yang berkenaan dalam pengambilan keputusan. Maka bisa dikatakan juga nama *bajing* adalah sebuah penobatan dari Masyarakat di mana bajing itu berada. Sebuah penobatan bajing tentunya bermacam-macam, ada yang menobati karena kewibawaannya, ada juga karena karena *kabengallah* (keberaniannya). Bagi Masyarakat Madura *bajing* merupakan salah satu tokoh terpenting selain dari pada pemimpin yang formal maupun nonformal (kyai). Istilah *bajing* hanya populer di Madura bagian timur (Sumenep dan Pamekasan), sedangkan di Madura bagian barat (Bangkalan dan Sampang) lebih dikenal istilah *blater*, meskipun sebenarnya kedua istilah tersebut tidak sepenuhnya sama. ada tingkatan dan kelas tersendiri yang membedakan pengertian *bajing* dengan *blater*. Potret *bajing* lebih kental bermain pada dunia hitam dan memiliki perangai yang kasar dan keras sedangkan *blater* sekalipun dekat dengan kultur kekerasan dan dunia hitam, namun perangai yang dibangun lebih lembut, halus dan memiliki keadaban. Di kalangan mereka sendiri dalam mempersepsikan diri, *bajing* adalah *blater* yang sudah naik kelas atau naik tingkat sosialnya (Rozaki, 2008).

Kekuasaan dan eksistensi dari seorang *bajing* dimanfaatkan oleh partai politik khususnya calon baik calon legislatif bahkan kepala desa untuk dijadikan tim sukses yang bertujuan untuk mengumpulkan suara untuk memenangkan sebuah pemilihan. Hal ini yang menjadi daya tarik bagi peneliti untuk dijadikan sebuah penelitian mengenai pemanfaatan *bajing* sebagai tim sukses di pilkades.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini penulis mengetahui atas fenomena yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Madura yaitu tentang Pemanfaatan *Bajing* Sebagai Tim Sukses Dalam Pemilihan Kepala Desa, dari uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana *bajing* dimanfaatkan sebagai tim sukses pemilihan kepala desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada perumusan masalah diatas, pada prinsipnya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sebuah fenomena *bajing* dimanfaatkan tim sukses pemilihan kepala desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Untuk melengkapi studi-studi terdahulu dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian yang terkait dengan persoalan *bajing* sebagai tim sukses pilkades.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sarana dalam mengimplementasikan ilmu yang telah didapat selama proses pembelajaran didalam kelas dengan membuat sebuah penelitian ilmiah yang sistematis, selain itu penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk peneliti berikutnya.